



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah

Rima Rachmawati¹. Dini Arwati². Shinta Dewi Herawati³. Sendi Gusnandar Arnan⁴
Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Abstract. *The purpose of this study is to find out the effect of the use of information technology in the administration of Assets. Asset management is not just administrative but more than an asset manager's effort to improve efficiency, effectiveness and increase asset added value assets itself. Government regulations regulate asset management through the use of information technology in the administration of assets, including bookkeeping, inventory and reporting activities. This research was conducted in the regional government work unit of Garut Regency which has implemented the Regional Goods Cycle Information Technology Application (ATISISBADA). The results of the study concluded that the optimal use of information technology in the ATISISBADA application was able to increase the effectiveness of assets administration activities. The implications of the results of this study are efforts to solve the problems that occur, namely optimizing the use of ATISISBADA in asset management activities in regional government.*

Keywords: *administration of asset; bookkeeping; information technology; inventory; regional property.*

Abstrak. *Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah (BMD). Penatausahaan asset/ BMD tidak hanya sekedar administratif tetapi lebih dari upaya pengelola asset untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan meningkatkan nilai tambah asset/ BMD itu sendiri. Peraturan pemerintah mengatur pengelolaan asset/ BMD melalui menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan penatausahaan asset/ BMD antara lain kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Garut yang telah menerapkan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara optimal dalam aplikasi ATISISBADA mampu meningkatkan keefektifan kegiatan penatausahaan asset/ BMD. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi yaitu mengoptimalkan penggunaan ATISISBADA dalam kegiatan pengelolaan asset/ BMD di pemerintahan daerah.*

Kata Kunci: *penatausahaan asset; pembukuan; inventarisasi; teknologi informasi; barang milik daerah.*

Corresponding author. rima.rachmawati@widyatama.ac.id

How to cite this article. R, Rima, A Dini. , D, H, Shinta. S, A, Sendi (2018). *Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barah Milik Daerah. Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 10(2), 189–197.*

History of article. Received: Juli 2018, Revision: September 2017, Published: Desember 2018

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563.

Copyright©2018. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Asset/ Barang Milik daerah (BMD) merupakan faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. Asset didefinisikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas/ perusahaan/ organisasi. Oleh karena itu, asset harus dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak menyebabkan turunnya nilai jual.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 jo, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan atau Daerah dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008, terakhir ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk pengelolaan barang milik negara/daerah yang profesional.

Pemerintah Daerah (Pemda) Garut berdiri sebagai wilayah/ daerah yang berpotensi menjadi daerah yang tangguh dan mandiri dengan rasa kedaerahannya hal ini diwujudkan oleh pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas publik yang baik terbukti dengan mendapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sekarang menjadi opini Wajar Tanpa Modifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seiring wangi harum WTP namun masih ada terdengar suara sumbang yang merasa belum puas, seperti yang disampaikan beberapa pakar yang menyatakan masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan asset daerah di Kabupaten Garut. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Anggota DPRD Garut periode 1998-2009

yang menyatakan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013 asset pemerintah daerah dinilai tidak wajar, diantaranya Penyajian Asset Tetap Tanah sebesar Rp22,8 miliar, Penyajian Asset Tetap, Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan di (Disdik) Pemda Garut sebesar Rp120,9 miliar, Dinkes sebesar Rp48,8 miliar dan Dinas SDAP senilai Rp3,2 miliar.

Selain itu, Penyajian Asset Tetap Gedung dan Bangunan yang juga tidak dapat diyakini kebenarannya mencapai Rp141,5 miliar, Penyajian asset tetap Jalan, Irigasi serta Jaringan sebesar Rp249,9 miliar dan Belanja modal minimal sebesar Rp5,5 miliar belum dapat diakui sebagai asset tetap (Ferdiansyah, 2013).

Menurut Praktisi Hukum Garut, Cecep Suhardiman, pemeriksaan BPK ada kelemahan karena setiap item pemeriksaannya tidak dilakukan secara detail, namun dilakukan secara sampling (pengambilan sebagian). Baik untuk pendapatan, belanja maupun penerimaan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan kendati sudah meraih WTP namun ada persoalan yang terjadi. Dari sebelas Pemda di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan Predikat opini WTP, Pemda (Kabupaten) Garut merupakan salah satu penerimanya. LHP BPK atas laporan keuangan Pemda Garut Tahun Anggaran 2015 memberikan opini WTP yang merupakan harapan semua institusi. Mendapatkan opini WTP lanjut Cecep, bukan membuat bangga warga Garut, justru malah mempertanyakannya karena ternyata masih ada beberapa temuan terutama pada pos belanja atau tata kelola administrasinya yang belum diselesaikan. Semisal untuk pengelolaan asset masih belum beres (amburadul). Sebagai contoh, permasalahan tanah Pasar Wanaraja yang di klaim milik Pemda, tanpa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat atas nama Pemda Garut cq Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindag PP). (Suhardiman, n.d.).

Pengelolaan BMD berdasarkan Peraturan Bupati Garut dijelaskan bahwa pengelolaan

keuangan termasuk pengelolaan aset digunakan teknologi informasi dengan aplikasi yang diberinama ATISISBADA yaitu suatu software didalamnya mencatat, mengkalsifikasikan, melaporkan prihal aset yang dimiliki pemerintah daerah. ATISISBADA juga digunakan untuk merencanakan, mengadakan, menatausahakan, memanfaatkan aset sampai ganti rugi aset. Dengan diterapkannya teknologi informasi diharapkan administrasi keuangan dan pengelolaan aset milik daerah dapat tertib sehingga membantu pengelola aset dalam melaporkan aset dengan akuntabel (Noor, 2017).

Strategi harus diterapkan agar pengelolaan dan pengurusan kekayaan aset/ BMD yang dimiliki setiap Pemda dapat optimal. Beberapa strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset/ BMD;
2. Menerapkan sistem informasi manajemen aset/ BMD;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset/ BMD;
4. Melibatkan pihak lain yang memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang penilaian aset (Mahmud, 2016).

Penyebab masih amburadulnya pengelolaan aset adalah belum optimalnya penggunaan ATISISBADA disinyalir sampai saat ini pengelolaan aset pada di beberapa Pemerintah Daerah belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Penerapan teknologi informasi terkendala antara lain oleh sumber daya manusia, jaringan, dan keterbatasan dana. Sehingga masih banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum memanfaatkan ATISISBADA untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh dan terintegrasi (Iis, 2016).

Nilai aset yang cukup besar dan tersebar, Pemerintah Kabupaten Garut perlu mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi/ ATISISBADA dengan penggunaan yang

optimal dengan cara mengintegrasikan bagian satu dengan bagian lain atau SKPD dengan SKPD lainnya. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan menguji pengaruh teknologi informasi pada efektifitas penatausahaan aset/ BMD.

KAJIAN LITERATUR

Penatausahaan aset/ BMD

Penatausahaan merupakan suatu konsep untuk membuat prosedur atau langkah-langkah kegiatan pengelolaan asser/ BMD. Prosedur tersebut mulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset/ BMD. Prosedur tersebut diatur dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah serta pelaksanaannya didasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 pada Pasal 4 menyebutkan yang di maksud aset/ BMD adalah aset/ BMD dimana pembeliannya menggunakan anggaran pendapatan daerah atau dapat melalui pemberian/ hibah dari phak lain. Penatausahaan aset/ BMD merupakan bagian dari penatausahaan keuangan suatu daerah. Penatausahaan keuangan daerah itu sendiri bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bagian yang perlu diperhatikan saat melakukan penatausahaan keuangan daerah bagaimana memahami asas dalam penatausahaan, bagaimana melaksanakan penatausahaan dan bagaimana implementasi penerimaan/ pengeluaran penatausahaan.

Penatausahaan aset disebut juga dengan istilah administrasi pada penelitian-penelitian luar negeri. Administrasi memiliki karakteristik perilaku pengorbanan diri, menyadari kepentingan public dan alturisme (Vandenabeele, 2007). Penatausahaan diinterpretasikan sebagai konsep dalam merancang pelayanan kepada publik dengan prilaku pengorbanan diri, kesadaran perannya sebagai pelayan publik dan alturisme. Alturisme diartikan sebagai cara

mengutamakan perhatian pelayan publik pada kesejahteraan orang lain dengan mengesampingkan kepentingan sendiri.

Penatausahaan asset/ BMD dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang pelaku bisnis, di pemerintahan daerah penatausahaan meliputi kegiatan pencatatan transaksi keuangan di pemerintahan daerah, inventarisasi asset/ BMD dan pelaporan asset/ BMD.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk mempercepat pengolahan data menjadi informasi. Teknologi informasi sering disebut juga teknologi komputer (*computing technology*) dan teknologi jaringan atau teknologi computer. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada setiap pengguna yang dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan (Bodnar, William, & Hopwood, 1995).

Tujuan perusahaan/ organisasi menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Pendapat (Thompson, Higgins, & Howell, 1991) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai pilihan individu untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi menunjukkan bahwa individu telah memutuskan untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya atau dengan kata lain

Hal senada juga didefinisikan (Teddy & Supomo, 2002) bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan perilaku untuk dalam menggunakan teknologi tersebut dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, atau dengan kata lain pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat

integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas.

Hal ini juga senada dengan pernyataan (Jogiyanto, 2005) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki fungsi/ peran penting di dalam organisasi antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas; komunikasi; dan kompetitif dalam pekerjaan/ operasional perusahaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menggunakan ATISISBADA sebagai software untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan asset/ BMD. ATISISBADA ini memiliki beberapa aplikasi siklus antara lain aplikasi untuk merencanakan kegiatan, mengadakan barang, menerima dan mengeluarkan kas, penatausahaan asset/ BMD, memanfaatkan asset/ BMD, mengamankan dan memelihara asset/BMD, menilai asset/ BMD, menghapuskan asset/ BMD, memindahtanganan, siklus pembiayaan, mencatat ganti rugi, membina, mengawasi dan mengendalikan

Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Efektifitas Penatausahaan Asset/ BMD

Penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan operasional perusahaan di era ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan baik komersial maupun pemerintahan. Kinerja yang dimaksud adalah kualitas informasi yang dihasilkan oleh teknologi/sistem informasi dalam hal ini ATISISBADA, berbeda dengan tanpa penggunaan teknologi, kualitas informasi yang dihasilkan akan lambat dan kurang memiliki keakurasian informasi.

ATISISBADA saat ini di pakai sebagai solusi diterapkannya teknologi informasi pada akuntansi pemerintahan daerah khususnya untuk melaksanakan penatausahaan asset/ BMD. Banyak kelebihan yang diperoleh dari menggunakan ATISISBADA tersebut antara lain menghasilkan informasi keberadaan, jumlah, jenis, volume asset/ BMD yang jelas dan akurat dan diharapkan dengan informasi yang jelas dan akurat tersebut dapat

mendukung pengambilan keputusan yang tepat selanjutnya dapat meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah.

Pendapat (Nelson, Todd, & Wixom, 2005) menyatakan bahwa teknologi informasi mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Hal senada dengan, (Stair & Reynolds, 2010) menambahkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap informasi sistem akuntansi (teknologi informasi) menyediakan semua jenis informasi manajemen untuk mendukung peran manajemen dalam mengarahkan seluruh kegiatan organisasi.

Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah sudah banyak dilakukan antara lain (Rizki, Domai, & Wachid, 2006), (Wahyuni, Fadah, & Sulianti, 2018), (Salamah, 2015), (Lantemona, Ilat, & Manossoh, n.d.), (Supit, Tinangon, & Mawikere, 2017) dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektifitas penatausahaan asset/ BMD. Senada dengan penelitian (Istiqomah, 2010) bahwa teknologi informasi mampu mempengaruhi kinerja individu unit analisis Dinas Pendapatan Daerah di Kota Mojokerto.

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap efektifitas penatausahaan asset/ BMD.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif explanatory dengan Subjek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Garut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penatausahaan asset tetap pada SKPD Pemerintah Kabupaten Garut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; variabel independen dan variable dependen. Pemanfaatan teknologi informasi disebut variable independen dan efektifitas penatausahaan asset/ BMD disebut variabel dependen. Variabel pemanfaatan teknologi

informasi menggunakan variabel penelitian (Teddy & Supomo, 2002) terdiri dari indikator: perangkat, pengelolaan data dan perawatan. Sedangkan variabel penatausahaan asset/ BMD diukur dengan indikator pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus barang pada SKPD Pemda Kabupaten Garut. Populasi yang digunakan adalah pengurus barang pada SKPD pada Pemda Kabupaten Garut sejumlah 75 orang yang melaksanakan kegiatan penatausahaan asset tetap. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 63.

Keabsahan data menggunakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas, menggunakan pendekatan *construct item-item* dengan koefisien korelasi *product-moment* dari *pearson*, Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka dikatakan valid. Uji Reliabilitas menggunakan *alpha cronbach*. Jika nilai *alpha cronbach* > 0,6 artinya variabel dinyatakan reliabel (Nazir, 2013).

Persamaan untuk uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = efektifitas penatausahaan asset tetap.

X = pemanfaatan teknologi informasi

β_1 = koefisien regresi

a = konstanta

ε = error estimation

Uji Statistik t (*t-test*), membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Saat t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} maka H_0 (H null) ditolak. Selain menggunakan uji t dapat juga digunakan uji dengan nilai angka probabilitas. Jika angka probabilitas lebih kecil dari angka signifikan 0,05, maka variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap variabel efektifitas penatausahaan asset/ BMD, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji keabsahan data melalui uji validitas dan reliabilitas.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable reliabel dengan nilai *alpha cronbach's* lebih besar dari titik kritis 0,6 (Nazir, 2013).

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam kategori kriteria cukup. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya kapasitas komputer yang dipergunakan belum menunjang tupoksi pengurus barang walaupun pemanfaatan komputer juga telah didukung dengan tersedianya jaringan internet di setiap unit kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Hasil analisis data dengan menggunakan regresi sederhana dijelaskan sebagai berikut:

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.349724582
R Square	0.122307283
Adjusted R Square	0.107918878
Standard Error	0.40999848
Observations	63

$$Y = 2,2078 + 0,4X + \epsilon$$

Persamaan ini menjelaskan bahwa :
 Konstanta: $\alpha = 2,2078$ adalah nilai matematis dari efektivitas penatausahaan asset jika tidak ada pemanfaatan teknologi informasi. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka penatausahaan asset akan semakin efektif.

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	2.207865308	0.516252	4.276722	6.79E-05
X Variable 1	0.4033921	0.138359	2.915546	0.004961

Pengujian Hipotesis

Uji t dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai t statistik > t table serta p-value < 0,05 dapat diinterpretasikan bahwa H_0 di tolak, artinya pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah daerah Kabupaten Garut mempengaruhi efektivitas penatausahaan asset.

Nilai adjusted R square sebesar 0,1079 artinya variabilitas efektivitas penatausahaan asset pemerintah daerah Garut dibangun/ dibentuk oleh variabilitas pemanfaatan teknologi informasi sebesar 10,79%.

Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kegiatan penatausahaan asset daerah di Kabupaten Garut dengan besarnya variabilitas teknologi informasi 10,79% terhadap variabilitas penatausahaan asset daerah.

Kegiatan pada prosedur penatausahaan asset yang terjadi di Kabupaten Garut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimulai dari petugas yaitu staf sub Bidang perencanaan dan Penatausahaan BMD menerima laporan hasil pencatatan dan pembukuan dari masing-masing SKPD. Dokumen yang diterima antara lain; surat pengantar, Daftar Hasil Pengadaan Barang Kartu Inventaris Barang KIB A sampai KIB F, Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang, Rekap Laporan Mutasi Barang. Sekaligus, staf ini akan mencatat laporan ini ke dalam buku agenda.
2. Staf sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD merekap dan menggabungkan dengan laporan dari SKPD lainnya, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan BMD untuk diverifikasi.
3. Hasil verifikasi diserahkan ke Kepala Bidang Pengelolaan Asset untuk disetujui atas data laporan dari SKPD. Setelah disetujui Laporan diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut contoh dokumen yang dimaksud pada prosedur di atas:

1. Daftar Hasil Pengadaan Barang Kartu Inventaris Barang (KIB) A sampai KIB F.
2. Buku/ Catatan Inventaris
3. Laporan Mutasi (perpindahan) Barang
4. Rekap Laporan Mutasi Barang

LAPORAN MUTASI BARANG KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN											
NOMOR		Spesifikasi Barang				Bahan	Asal-usul/ Cara Perolehan Barang	Tahun Beli Perolehan	Ukuran Barang/ Kontrol (P,S,D)	Satuan	Keadaa n (B/K/B)
No Urut	Kode Barang	Register	Nama Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Chasis No. Pabrik No. Mesin						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

KARTU INVENTARIS
A. TANAH

NO KODE LOKASI :

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Stat Hak	Tanggal	Nomor	Penggunaan	Asal Usul	(Ribuan)	Keterangan
		Kode Barang	Register										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui
Kepala SKPD
NIP

**REKAPITULASI LAPORAN MUTASI BARANG
MILIK KABUPATEN GARUT
TAHUN**

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 1 Jan 20..		Mutasi/Perubahan s/d 31		
			Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	Berkurang Jumlah Barang	Berkurang Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8

BUKU INVENTARIS

SKPD :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Merk / Ukuran	Spesifikasi Barang			Bahan
				No. Sertifikat	No. Chasis	No. Pabrik	
1	2	3	4	5	6	7	8

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 1 Jan 20..		Mutasi/Perubahan s/d 31		
			Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	Berkurang Jumlah Barang	Berkurang Jumlah Harga	
1	01	01	TANAH				
2	02	02	MESIN				
		03	a. Alat - alat Besar				
		04	b. Alat - alat Angkutan				
		05	Alat Ukur				
		06	Peternakan				
		07	Rumah Tangga				
		08	Komunikasi				
		09	g. Alat - alat kedokteran				
		10	f. Alat - alat Laboratorium				
3	03	10	f. Alat - alat Keamanan				
		11	BANGUNAN				
		12	a. Bangunan Gedung				
		13	b. Bangunan Monumen				
4	04	13	JARINGAN				
		14	a. Jalan dan Jembatan				
		15	b. Bangunan air dan Irigasi				
		16	c. Instalasi				
		17	d. Jaringan				
5	05	17	ASSET TETAP LAINNYA				
		18	a. Buku Perpustakaan				
		19	Kesenian				
		20	Tumbuhan				
6	06	19	PENGERJAAN				
		21	Jumlah				

Mengetahui
Kepala SKPD
NIP

Mengetahui
Kepala SKPD/Pengelola
NIP.

Diinterpretasikan bahwa penatausahaan daerah menurut Permendagri No 17 Tahun 2007, kegiatannya meliputi; pembukuan, inventarisasi dan pelaporan asset/ BMD. Masing-masing kegiatan akan dijelaskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2005):

1. Pembukuan BMD
2. Inventarisasi BMD. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memutakhirkan kekayaan yang dimiliki pemerintahan daerah. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan Buku Inventaris yang akan

meninventarisir kekayaan pemerintahan daerah, baik asset yang bergerak maupun asset yang tidak bergerak. Buku Inventarisir berisi data lokasi kekayaan/ BMD, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

3. Pelaporan BMD. Pelaporan BMD adalah kegiatan langkah-langkah penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakuka inventarisir dan pencatatan. Laporan penggunaan barang disampaikan oleh pengguna BMD dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

SIMPULAN

Amanah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Nomor 2 tahun 2015 dan Perhub Nomor 14 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD menyatakan bahwa penatausahaan merupakan ruhnya pengelolaan keuangan daerah. Implementasi peraturan tersebut harus diperhatikan oleh Pengelola set. Pengelola asset harus dapat menjaga amanah peraturan tersebut dan menjalankan tupoksinya. ATISISBADA salah satu upaya pengelolaan asset dengan pendekatan penggunaan teknologi sebagai solusi banyaknya aktivitas yang harus dijalankan oleh pengelola asset.

Dalam prakteknya tidak mudah juga teknologi informasi tersebut dilakukan, membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang handal yang mana tenaga kerja yang handal pun masih minim keberadaannya.

Namun demikian, upaya implementasi ATISISBADA tetap harus dijalankan agar akuntabilitas public tetap jadi acuannya. Pemerintah Daerah Garut salah satu Kabupaten yang telah menerapkan ATISISBADA dan masih terus memerlukan pengembangan karena masih belum optimalnya penggunaan software tersebut.

Berdasarkan uni analisis menyatakan optimalisasi penggunaan Sim dapat mempengaruhi efektifitas penatausahaan asset/ BMD.

Adapaun variabilitas efektifitas penatausahaan asset/ BMD dibentuk oleh variabilitas penggunaan teknologi informasi sebesar 10.77%.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, William, & Hopwood. (1995). *Accounting Information System*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ferdiansyah, F. (2013). Dana pengelolaan aset Pemkab Garut diselewengkan. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/773857/21/dana-pengelolaan-aset-pemkab-garut-diselewengkan-1377081812>
- Iis Rahmawati. (2016). *Pengaruh Komitmen Pimpinan, Kompetensi Pengurus Barang dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap pada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Garut*. Bandung: Tesis Magister Akuntansi Universitas Widyatama.
- Istiqomah, I. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Individual. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 2(1).
- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (n.d.). *Analisis penatausahaan barang milik daerah di kabupaten kepulauan talaud*.
- Mahmud. (2016). Aset Daerah Pilar Utama Pendapatan Asli Daerah - Garut News. Retrieved October 28, 2018, from <http://garutnews.com/aset-daerah-pilar-utama-pendapatan-asli-daerah.html>
- Nelson, R.R., Todd, P.A., & Wixom, B.H. (2005). Antecedents of Information and Systems Quality: an empirical examination within the context of data. *Journal of Management Information Systems*, 199-235.
- Noor, W. (2017). Kabid BMD DPKAD Kab. Retrieved October 28, 2018, from <http://news.juggala.co.id/kabid-bmd-dpkad-kab-garut-asep-herdiana-s-sos-m-si-penata-usahaan-adalah-ruh->

- pengelolaan-barang-milik/
- Rizki, L., Domai, T., & Wachid, A. (2006). Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 93–101.
- Salamah, U. (2015). *Pemanfaatan SABDA dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapatan E-Government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan*. Surabaya.
- Suhardiman, C. (n.d.). Berita Garut Terima Opini WTP Disaat Pengelolaan Aset Amburadul_. Retrieved October 28, 2018, from <http://fokusjabar.com/berita-priangan/garut-terima-opini-wtp-disaat-pengelolaan-aset-amburadul-h48937.html>
- Supit, P., Tinangon, J., & Mawikere, L. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP No. 27 Tahun 2014 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 276–285.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2010). *Principle of Information Systems*. New York: Cengage Learning.
- Teddy, J., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntansi Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2), 214-228.
- Thompson, R., Higgins, C., & Howell, J. (1991). Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. *Management Information Systems*, 15(1), 125-143.
- Vandenabeele, W. (2007). Toward a Public Administration Theory of Public Service Motivation. *Public Management Review*, 9(4), 546–556. <https://doi.org/10.1080/14719030701726697>
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Sulianti, D. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 66–80.

Undang-undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penatausahaan.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- .